

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BA.018
TAHUN ANGGARAN 2016

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016

JALAN PEMUDA NO. 29 A BOGOR 16161

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPMSPH mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPMSPH. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, Januari 2017

Kepala Balai



drh. Rr. Endang Ekowati

NIP. 196209161994032001

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii-iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
<i>Routing Slip</i>	vi
Catatan Hasil Review (CHR) Kantor Daerah	vii-viii
Ringkasan Laporan Keuangan	ix-x
I Laporan Realisasi Anggaran	xi
II Neraca	xii
III Laporan Operasional	xiii
IV Laporan Perubahan Ekuitas	xiv
V Catatan atas Laporan Keuangan	1-35
A Penjelasan Umum	
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPMSPH	1-3
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.3. Basis Akutansi	3-4
A.4. Dasar Pengukuran	4
A.5. Kebijakan Akutansi	4
(1) Pendapatan –LRA	5
(2) Pendapatan- LO	5
(3) Belanja	5-6
(4) Beban	6
(5) Aset	6
a. Aset Lancar	6-7
b. Aset Tetap	7-8
c. Penyusutan Aset Tetap	8-9
d. Piutang Jangka Panjang	9
e. Aset Lainnya	9-10
(6) Kewajiban	10-11
(7) Ekuitas	11
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	12
B.1 Pendapatan	12-13
B.2 Belanja	13-14
B.2.1 Belanja Pegawai	14-15

B.2.2	Belanja Barang	15-16
B.2.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16-17
B.2.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	17-18
B.2.5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	18-19
C	Penjelasan atas Pos-pos Neraca	
C.1	Aset Lancar.....	19
C.1.1	Persediaan.....	19
C.2	Aset Tetap	19
C.2.1	Tanah	19-20
C.2.2	Peralatan dan Mesin	20-21
C.2.3	Gedung dan Bangunan.....	21-22
C.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	22
C.2.5	Aset Tetap Lainnya	22-23
C.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	23
C.2.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	23
C.3	Aset Lainnya	23
C.3.1	Aset Lain-lain	24
C.3.2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	24
C.4	Kewajiban Jangka Pendek.....	24
C.4.1	Utang kepada Pihak Ketiga.....	24-25
C.5	Ekuitas.....	25
C.5.1	Ekuitas.....	25
D	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	26
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.....	26
D.2	Beban Pegawai.....	26-27
D.3	Beban Persediaan	27-28
D.4	Beban Barang dan Jasa.....	28-29
D.5	Beban Pemeliharaan	29
D.6	Beban Perjalanan Dinas	30
D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	30-31
D.8	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31
D.9	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	32
E	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	33
E.1	Ekuitas Awal	33

E.2	Surplus/Defisit-LO	33
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi /Kesalahan Mendasar	33
E.4.1	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	33
E.4.2	Penyesuaian Nilai Aset	33
E.5	Transaksi Antar Entitas	34
E.6	Ekuitas Akhir	34
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	35
F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	35
F.2	Pengungkapan Lain-lain	35



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

Jl. Pemuda No. 29A Bogor 16161
Telepon (0251) 8377111, 8353712 Faksimili (0251) 8353712

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, Januari 2017

Kepala Balai,



drh. Rr. Endang Ekowati

NIP. 196209161994032001



ROUTING SLIP

Laporan Keuangan Tingkat Unit Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
(UAKPA/B)

Tahun Anggaran 2016

Nama Satker : BPMS PH
 Jenis Kewenangan : KD
 Kode Satker : 567275
 Alamat Satker : Jl. PEMUDA NO 29A
 Contact Person SAIBA : ANGRYANI, CP.
 Contact Person SIMAK : ERWIN YUSUF

NO	PETUGAS VERIFIKASI/REVIU	HARI/TANGGAL	PUKUL	PARAF/TTD VERIFIKATOR/REVIU
1.	SAIBA (Verifikasi)	23 JAN 17	17.30	
2.	SIMAK (Verifikasi)	23 Jan '17	17.30	
3.	Itjen (Reviu)	25 Jan '17	14.25	
4.	Sekretariat UAPPA/B-W	Jan 28.17	17.05	





Operator SAIBA

(Angryani.....)

Operator SIMAK

(Erwin.....)

CATATAN HASIL REVIU (CHR)
KANTOR DAERAH

KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL	No Indeks KKR	: CHR-03/KD/BPMSPH-06
	Disusun oleh	: Atiek Pratiwi P N 
	Tanggal	: 25 Januari 2017
	Direviu KT/tgl/paraf	: Ir. Siti Halimah, M.Si / 25 Jan 2017 
	Direviu Dalnis/tgl/paraf	: Ngadiningsih, SH, MM / 25 Jan 2017 
	Disetujui Daltu/tgl/paraf	: Ir. Dahono, M.Si / 25 Jan 2017 
UAPPA	: Kementerian Pertanian (018)	
UAPPA E1	: Ditjen Peternakan (06)	
UAPPA/B-W	: Jawa Barat (0200)	
UAKPA/B	: Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (567275)	
Uraian Catatan Hasil Reviu		Indeks KKR
Penyelenggaraan Akuntansi		
1	Satker telah menyusun Laporan Keuangan berupa LRA (Pendapatan, belanja, pengembalian belanja dan pengembalian pendapatan), LO, LPE, Neraca per 31 Des. 2016, CaLK, Laporan BMN Intra dan Ekstra Komptabel, Gabungan Intra dan Ekstra Komptabel, maupun CaLBMN, serta Laporan Kondisi Barang (LKB).	KKR PA
Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan periode 31 Desember 2016		
1	Satker telah melakukan rekonsiliasi internal antara petugas SAK dengan petugas SIMAK BMN dan telah dilengkapi dengan BA Rekonsiliasi Nomor: 15001/KU.050/F6.A/07/2016, dengan hasil tidak ada permasalahan/perbedaan.	KKR LRA
2	Rekonsiliasi DIPA, LRA dan neraca per 31 Desember 2016 telah dilakukan antara UAKPA dengan KPPN sesuai BAR Nomor: BAR-206725/WPB.12/KP.023/2017 Tanggal 9 Januari 2017, dengan hasil tidak ada permasalahan/perbedaan.	KKR LRA
3	Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Realisasi Pendapatan berupa PNPB senilai Rp363.722.400,00 dan Realisasi belanja senilai Rp16.213.652.249,00	KKR LRA
4	PNBP tersaji di LRA pendapatan senilai Rp363.722.400,00 atau sebesar 80,83% dari anggaran senilai Rp450.010.000,00	KKR LRA
5	Realisasi Belanja Pegawai senilai Rp3.168.727.479,00 atau sebesar 98,33% dari anggaran senilai Rp3.222.437.000,00	KKR LRA
6	Realisasi Belanja Barang senilai Rp10.584.867.512,00 atau sebesar 99,08% dari anggaran senilai Rp10.683.300.000,00	KKR LRA
7	Realisasi Belanja Modal senilai Rp2.453.123.158,00 atau sebesar 96,25% dari anggaran senilai Rp2.548.830.000,00	KKR LRA
8	Realisasi Belanja Persediaan (saldo Akhir) senilai Rp6.245.360.172,00	
9	Pengembalian Belanja senilai Rp-6.934.100,00	
Laporan Operasional (LO)		
1	LO telah dibuat secara memadai	KKR LO
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)		
1	Saldo Awal Ekuitas telah sesuai dengan Saldo Ekuitas Neraca periode sebelumnya.	KKR LPE
2	Koreksi hasil reviu atas Surplus/Defisit Laporan Operasional telah diperhitungkan pada LPE.	KKR LPE
Neraca per 31 Desember 2016		
Aset Lancar		
1	Nilai persediaan senilai Rp6.245.360.172,00 telah didukung dengan BA <i>Stock Opname</i> dan telah sesuai dengan Saldo Persediaan pada Laporan BMN	KKR-Neraca
Aset Tetap		

1	Satker telah melakukan rekonsiliasi data BMN dengan KPKNL telah dilakukan sesuai BAR Nomor.BAR-044/THN/WKN.08/KNL.03/2017 tanggal 3 Januari 2017, dengan hasil tidak ada permasalahan/perbedaan.	KKR-Neraca
2	Satker telah melakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) pada tahun 2013	KKR-Neraca
3	Saldo akun tanah senilai Rp18.692.000.000,00 dan telah dilengkapi Sertifikat Tanah a.n Kementerian Pertanian	
3	Saldo Peralatan dan Mesin senilai Rp32.054.183.380,00 dan telah sesuai dengan Laporan BMN	KKR-Neraca
4	Saldo Gedung dan Bangunan senilai Rp32.069.999.778,00 dan telah sesuai dengan Laporan BMN	KKR-Neraca
5	Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.466.279.600,00 dan telah sesuai dengan Laporan BMN	KKR-Neraca
6	Saldo Aset Tetap Lainnya senilai Rp27.000.000,00 dan telah sesuai dengan Laporan BMN	KKR-Neraca
7	Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp49.076.500,00 dan telah sesuai dengan Laporan BMN	
7	Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai Rp19.404.657.843,00 dan telah sesuai dengan Laporan BMN	KKR-Neraca
8	Saldo Aset Lainnya senilai Rp240.178.000,00 dan telah sesuai dengan Laporan BMN	
9	Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya senilai Rp239.878.000,00 dan telah sesuai dengan Laporan BMN	KKR-Neraca
10	Utang kepada Pihak Ketiga senilai Rp32.605.164,00 dan telah sesuai	
CaLK		
Penjelasan CaLK atas akun-akun di neraca telah sesuai dengan saldo akun-akun di LRA dan neraca.		KKR CaLK
Koreksi/Perbaikan yang belum dilakukan.		
1	-	

Tim Itjen




Rifki Ariefianto, SE., MM
Nip. 19800125 200501 1 003



Atiek Pratiwi Putri Naue, SH
Nip. 19870119 200901 2 001

Ciawi, 25 Januari 2017

Petugas SAIBA



Augryani CP

No. Hp 081 329 322 015

Petugas SIMAK-BMN



Erwin Yusuf

No. Hp 081 310 112 378

Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk HewanTahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 363,722,400 atau mencapai 80.83% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 450,010,000

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp16,206,718,149 atau mencapai 98,49% dari alokasi anggaran sebesar Rp 16,454,567,000

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp 71,166,947,900 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 5,581,424,784 ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 65,535,223,116; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 300,000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 32,605,164 dan Rp 71,084,342,736.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 250,483,785, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 15,334,362,808 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp 15,083,879,023. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 366,489,109 dan Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 15,450,368,132.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp 70,056,390,591 ditambah Defisit-LO sebesar Rp 15,450,368,132 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp 635,324,528 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 15,842,995,749 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp 71,084,342,736.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015

Uraian	Catatan	31 Desember 2016			31 Desember 2015
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	450,010,000	363,722,400	80.83	1,188,547,568
Jumlah Pendapatan		450,010,000	363.722.400,00	80.83	1,188,547,568
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	3,222,437,000	3,168,727,479	98.33	2,939,923,359
Belanja Barang	B.2.2	10,683,300,000	10,584,867,512	99.08	10,977,336,068
Jumlah Belanja Operasi		13,905,737,000	13,753,594,991	98.91	13,917,259,427
Belanja Modal					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.2.3	467,168,000	391,560,000	83.82	14,499,521,500
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B.2.4	657,608,000	651,081,558	99.01	14,785,679,847
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	B.2.5	1,424,054,000	1,410,481,600	99.05	0
Jumlah Belanja Modal		2,548,830,000	2,453,123,158	96.25	29,285,201,347
Jumlah Belanja		16,454,567,000	16,206,718,149	98.49	43,202,460,774

Bogor , Januari 2017
Kepala Balai,

drh. Rr. Endang Ekowati
NIP. 196209161994032001

II. NERACA**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015**

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1	5,581,424,784	3,792,977,684
Jumlah Aset Lancar		5,581,424,784	3,792,977,684
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	18,692,000,000	18,692,000,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	32,680,231,018	31,662,623,380
Gedung dan Bangunan	C.2.3	32,069,990,778	31,418,909,220
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	1,466,279,600	55,798,000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	27,000,000	27,000,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	49,076,500	49,076,500
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.7	-18,232,963,043	-15,090,868,540
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.7	-1.160.223.667,00	-515.860.376,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.7	-31,668,070	-11,365,277
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	C.2.7	-24,500,000	-24,500,000
Jumlah Aset Tetap		65,535,223,116	66,262,812,907
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1	240,178,000	240,178,000
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.3.2	-239,878,000	-239,578,000
Jumlah Aset Lainnya		300,000	600,000
Jumlah Aset		71,116,947,900	70,056,390,591
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	32,605,164	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		32,605,164	0
Jumlah Kewajiban		32,605,164	0
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	71,084,342,736	70,056,390,591
Jumlah Ekuitas		71,084,342,736	70,056,390,591
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		71,116,947,900	70,056,390,591

Bogor, Maret 2017
Kepala Balai,

drh. Rr. Endang Ekowati
NIP. 196209161994032001

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	250,483,785	642,239,451
JUMLAH PENDAPATAN		250,483,785	642,239,451
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3,168,727,479	2,939,923,359
Beban Persediaan	D.3	449,851,312	2,569,189,878
Beban Barang dan Jasa	D.4	3,996,257,292	3,478,875,281
Beban Pemeliharaan	D.5	2,143,837,985	1,615,587,288
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,759,351,263	2,451,973,205
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	3,816,337,447	2,539,797,459
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	0	-2,666,230
JUMLAH BEBAN		15,334,362,808	15,592,680,240
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-15,083,879,023	-14,950,440,789
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	3,345,000	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	355,859,226	13,061,990
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		355,859,226	13,061,990
SURPLUS/DEFISIT - LO		-15,450,368,132	-14,937,378,799

Bogor, Maret 2017
Kepala Balai,

drh. Rr. Endang Ekowati
NIP. 196209161994032001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
EKUITAS AWAL	E.1	70,056,390,591	42,468,051,199
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-15,450,368,132	-14,937,378,799
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1	635,324,528	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.2	0	511,804,985
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	15,842,995,749	42,013,913,206
EKUITAS AKHIR		71,084,342,736	70,056,390,591

Bogor, Maret 2017
Kepala Balai,

drh. Rr. Endang Ekowati
NIP. 196209161994032001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Dasar Hukum Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH)
Entitas dan adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan
Rencana Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian yang dibina secara teknis oleh
Strategis Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/5/ 2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, BPMSPH menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan penyiapan sampel pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
4. Penyiapan perumusan hasil pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
5. Pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
6. Pelaksanaan pemantauan dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan;
7. Pelaksanaan pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian dan pemberian saran untuk mendukung sertifikat unit usaha produk hewan;
8. Pelaksanaan sertifikasi hasil uji dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
9. Pelaksanaan kajian resiko produk hewan berdasarkan hasil uji;
10. Pelaksanaan pengkajian batas maksimum residu dan cemaran mikroba;
11. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;

12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan diseminasi informasi laboratorium veteriner yang membidangi kesehatan masyarakat veteriner;
13. Penyelenggaraan uji profisiensi produk hewan;
14. Pelayanan teknis kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
15. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga BPMSPH.

Rencana Strategis Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dibuat pada tahun anggaran 2015 yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2019. Rencana strategis BPMSPH ini telah disusun dengan mengacu kepada Renstra Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga lebih dititikberatkan kepada pelaksanaan kegiatan BPMSPH yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat melalui Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing.

Dalam rangka menentukan arah dan menjalankan peranan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, maka BPMSPH telah menentukan visi dan misi. Visi merupakan gambaran tentang suatu keadaan ideal yang diinginkan dimasa yang akan datang dan merupakan suatu harapan masa depan BPMSPH. Visi ini merupakan acuan untuk mengarahkan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan BPMSPH untuk mewujudkan cita-citanya. Adapun visi BPMSPH adalah **“Mewujudkan BPMSPH sebagai lembaga pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan nasional yang handal dan bertaraf internasional”**. Misi BPMSPH menggambarkan tugas utama yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan berdasarkan mandat yang diberikan. Selain itu misi BPMSPH tidak hanya memperhatikan kepentingan BPMSPH sendiri saja, tetapi harus juga memperhatikan kepentingan *stakeholders*. Misi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan pemeriksaan, pengujian keamanan dan mutu produk hewan dengan menerapkan persyaratan laboratorium yang diakreditasi;
2. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas laboratorium

dalam rangka menjamin keabsahan/validitas hasil pengujian dan mewujudkan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal;

3. Melaksanakan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
4. Meningkatkan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal;
5. Meningkatkan pengembangan teknik dan metode pengujian keamanan dan mutu produk hewan yang didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan jejaring kerja dengan pelanggan dan *Stakeholders*/lembaga terkait.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan

jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp300,000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10,000,000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama

Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	450,010,000	450,010,000
Jumlah Pendapatan	450,010,000	450,010,000
Belanja		
Belanja Pegawai	3,222,437,000	3,222,437,000
Belanja Barang	12,171,362,000	10,683,300,000
Belanja Modal	819,442,000	2,548,830,000
Jumlah Belanja	16,213,241,000	16,454,567,000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp 363,722,400*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 363,722,400 atau mencapai 80.83% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 450,010,000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0	3,345,000	0
Pendapatan Jasa	450,010,000	245,644,500	54.59
Pendapatan luran dan Denda	0	4,839,285	0
Pendapatan Lain-lain	0	109,893,615	0
Jumlah	450,010,000	363,722,400	80.83

Realisasi Pendapatan TA 2016 mengalami penurunan sebesar -69.40% dibandingkan TA 2015. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada

BPMSPH adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	3,345,000	0	0
Pendapatan Jasa	245,644,500	548,228,500	-55.19
Pendapatan Iuran dan Denda	4,839,285	23,435,821	-79.35
Pendapatan Lain-lain	109,893,615	616,883,247	-82.19
Jumlah	363,722,400	1,188,547,568	-69.40

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp16,206,718,149 Realisasi Belanja pada TA 2016 adalah sebesar Rp16,206,718,149 atau 98.49% dari anggaran belanja sebesar Rp16,454,567,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2016

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	3,222,437,000	3,168,727,479	98.33
Belanja Barang	10,683,300,000	10,591,801,612	99.14
Belanja Modal	2,548,830,000	2,453,123,158	96.25
Total Belanja Kotor	16,454,567,000	16,213,652,249	98.54
Pengembalian Belanja		-6,934,100	0
Total Belanja	16,454,567,000	16,206,718,149	98.49

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	.%
Kegiatan			
Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan	10,313,607,000	10,169,715,872	98.61

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	.%
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	6,140,960,000	6,043,936,377	98.42
Total Belanja Kotor	16,454,567,000	16,213,652,249	98.54
Pengembalian Belanja		-6,934,100	0
Total Belanja	16,454,567,000	16,206,718,149	98.49

Dibandingkan dengan Tahun 2015, Realisasi Belanja TA 2016 mengalami penurunan sebesar -62.49% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Realisasi Belanja Pegawai secara nominal mengalami peningkatan sebesar 7.78 % dialokasikan untuk penambahan pegawai baik pegawai negeri sipil, pramubakti dan petugas keamanan serta kenaikan pangkat dan golongan dan renumerasi.
2. Realisasi Belanja Barang secara nominal mengalami penurunan disebabkan adanya program penghematan dari pemerintah pusat.
3. Realisasi Belanja Modal secara nominal mengalami penurunan sebesar 91.62 %, disebabkan anggaran tahun 2016 tidak memfasilitasi pengadaan pembelian peralatan dan mesin, pembangunan gedung baru maupun pembelian alat laboratorium seperti di tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	.%
Belanja Pegawai	3,168,727,479	2,939,923,359	7.78
Belanja Barang	10,584,867,512	10,977,336,068	-3.58
Belanja Modal	2,453,123,158	29,285,201,347	-91.62
Total Belanja	16,206,718,149	43,202,460,774	-62.49

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp3,168,727,479

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3,168,727,479 dan Rp2,939,923,359. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2016 secara nominal mengalami kenaikan sebesar 7.78% dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Kenaikan pangkat golongan PNS.
3. Penambahan remunerasi PNS.

Tingkat penyerapan belanja pegawai dalam tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 8.76% dibanding dengan kinerja daya serap tahun 2015, pada tahun 2016 penyerapan belanja pegawai sebesar 98.33 % sedangkan di tahun 2015 hanya sebesar 89.57%.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,156,799,479	2,920,740,162	8.08
Belanja Lembur	11,928,000	23,786,400	-49.85
Jumlah Belanja Kotor	3,168,727,479	2,944,526,562	7.61
Pengembalian Belanja Pegawai	0	-4,603,203	-100
Jumlah Belanja	3,168,727,479	2,939,923,359	7.78

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp10,584,867,512

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp10,584,867,512 dan Rp10,977,336,068. Realisasi belanja barang TA 2016 mengalami penurunan sebesar -3.58% dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dilakukan utamanya terhadap belanja perjalanan dinas dan paket *meeting*, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, dan operasional perkantoran lainnya, serta pembangunan gedung/kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, anggaran dari kegiatan yang belum terikat, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (*carry over*) ke tahun anggaran berikutnya sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2016.

Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1,117,929,440	901,461,100	24.03
Belanja Barang Non Operasional	2,291,313,805	2,190,325,975	4.38
Belanja Barang Persediaan	3,104,945,302	4,239,588,400	-26.76
Belanja Jasa	554,887,633	414,188,206	36.22
Belanja Pemeliharaan	1,756,918,819	779,799,182	125.30
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,744,274,113	2,451,973,205	-29
Belanja Perjalanan Luar Negeri	21,497,050	0	0
Jumlah Belanja Kotor	10,591,801,612	10,977,336,068	-3.51
Pengembalian Belanja Barang	-6,934,100	0	0
Jumlah Belanja	10,584,867,512	10,977,336,068	-3.58

B.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp391,560,000*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp391,560,000 dan Rp14,499,521,500. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 mengalami penurunan sebesar -97.30% dibandingkan dengan serapan TA 2015. Penyerapan anggaran yang juga lebih rendah 1.01 % dibandingkan dengan serapan anggaran pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 sebesar 96.25% dan tahun 2015 sebesar 97.26%. Lebih rendahnya realisasi dan penyerapan anggaran belanja modal terutama berkaitan dengan percepatan perubahan APBN pada semester I, yang mengakibatkan perlu dilakukan penyesuaian proses penyesuaian dokumen anggaran pada kementerian. Sedangkan pada sisi lain dalam tahun 2015 penyerapan anggaran belanja modal didukung oleh pembelian aset tetap terutama peralatan laboratorium untuk mendukung berlangsungnya pengujian di gedung laboratorium baru serta aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2016 dialokasikan pada

Alat kantor dan rumah tangga

Rp. 75,500,000

2. Alat Laboratorium :
 - Alat Laboratorium Hidrokimia Rp. 132,000,000
 - Refrigerator Rp. 2,800,000
3. Pembelian/ pemasangan *background* ruang Kepala Balai Rp. 20,000,000
4. Komputer (*Notebook* 6 buah) Rp. 104,560,000
5. Alat keselamatan kerja (AC 6 buah) Rp. 56,700,000

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	391,560,000	14,499,521,500	-97.30
Jumlah Belanja Kotor	391,560,000	14,499,521,500	-97.30
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	391,560,000	14,499,521,500	-97,30

B.2.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 651,081,558

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp651,081,558 dan Rp14,785,679,847. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 mengalami penurunan sebesar -95.60% dibandingkan TA 2015. Namun penyerapan anggaran tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 2.98 % dibandingkan dengan serapan anggaran pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 sebesar 99.01% dan tahun 2015 sebesar 96.03%. Penurunan yang cukup signifikan pada realisasi anggaran dapat dijelaskan pada sisi dukungan anggaran terhadap pembangunan gedung laboratorium dan gedung bimtek/ gedung pertemuan permanen yang terjadi di tahun 2015.

Adapun alokasi anggaran sebesar Rp. 651,081,558 di tahun 2016 digunakan untuk :

1. Renovasi Pagar Permanen (1 unit) Rp. 274,602,200
2. Pengembangan Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (1 unit) Rp. 193,171,000

3. Pengembangan Gedung Perkantoran

Permanen (1 unit) Rp. 134,550,000

4. Pengembangan Bangunan Gedung

Pertemuan Permanen (1 unit) Rp. 48,758,000

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2016 dan 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	651,081,558	14,785,679,847	-95.60
Jumlah Belanja Kotor	651,081,558	14,785,679,847	-95.60
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	651,081,558	14,785,679,847	-95.60

B.2.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp1,410,481,600*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1,410,481,600 dan Rp 0. Dukungan anggaran pada penambahan atas nilai Jaringan terjadi di tahun anggaran 2016.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,410,481,600	0	0
Jumlah Belanja Kotor	1,410,481,600	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	1,410,481,600	0	0

Nilai nominal anggaran sebesar Rp. 1,410,481,600 berasal dari

1. Jaringan Transmisi Tegangan
100 s/d 300 KVA (1 unit) Rp. 1,210,611,600
2. Jaringan gas laboratorium Rp. 199,860,000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 PERSEDIAAN

Persediaan
Rp 5,581,424,784

Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5,581,424,784 dan Rp3,792,977,684. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Persediaan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Barang Konsumsi	33,992,958	34,499,093
Bahan untuk Pemeliharaan	100,158,925	54,838,373
Suku Cadang	849,771,352	1,065,909,789
Bahan Baku	4,597,501,549	2,637,730,429
Jumlah	5,581,424,784	3,792,977,684

C.2 ASET TETAP

Aset Tanah
Rp
18,692,000,000

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPMSPH per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp18,692,000,000 dan Rp18,692,000,000.

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	8,000 m ²	Pemuda No, 29a Rt.01/06, Tanah Sareal	18,692,000,000
Jumlah			18.692,000,000

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Aset Alsin
Rp32,680,231,018

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPMSPH per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp32,680,231,018 dan Rp31,662,623,380. Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin Tahun 2016

URAIAN	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
132111 Peralatan dan Mesin		
Lemari Besi/ Metal	4	13,636,364
Filling Cabinet Besi	4	10,000,000
Meja Kerja Kayu	25	22,500,000
<i>Sound System</i>	1	29,363,636
Alat Hidrokimia Lainnya	1	132,000,000
Refrigerator	1	2,800,000
<i>Background</i>	1	20,000,000
<i>Note Book</i>	6	104,560,000
<i>Air Conditioning</i>	6	56,700,000
Dispenser 10-50 ml	1	10,050,000
<i>Rocking Roller Mixer</i>	1	23,290,000
<i>Rocking Roller Mixer</i>	1	21,250,000
Test Tue Rocker	1	17,300,000
Top Buret	1	26,294,400
Tube Revolver + Rotisserie Paddle	1	8,975,000
Vortex Multifungsi	2	26,520,000
pH Meter	1	7,900,000
Portable Microbiological air sampler diameter plate 60 mm	1	70,440,000

Timbangan Digital	1	9,000,000
Balance Electric	1	14,360,000
Dispenser 5-30 ml	1	10,050,000
Vortex Multifungsi	1	13,975,000
Micropipette 100-1000 µl	4	14,120,000
Micropipette 20-200 µl	4	14,140,000
Multichanel Pipette	2	25,160,000
Multipette M4	4	17,680,000
Pipette Carousel	3	6,630,000
Tube Revolver + Rotisserie Paddle	1	7,680,000
Mikropipet single channel 10-100 µl	1	5,068,751
Mikropipet single channel 20-200 µl	2	10,137,502
Mikropipet single channel 100-1000 µl	2	10,137,502
pH Meter	1	6,465,484
Vortex Multifungsi	2	24,717,000
Micropipet single channel 0,2-2 µl	1	4,114,000
Micropipet single channel 10-100 µl	1	6,947,000
Micropipet single channel 20-200 µl	1	6,947,000
Timbangan Digital	1	9,075,000
Vortex Multifungsi	1	12,700,000
Waterbath 6 liter	1	10,600,000
Anaero Box L	2	19,884,000
Portable Microbiological air sampler diameter plate 60 mm	1	70,000,000
Timbangan Digital	1	9,400,000
High Speed Microsentifuge	1	29,040,000
Micropipet single chanel 20-200 µl	1	6,950,000
Micropipet single channel 100-1000 µl	1	6,950,000
Roller Mixer	1	21,100,000
Waterbath 6 liter	1	11,000,000
Mutasi Tambah	104	1,017,607,639

Aset Gedung dan
Bangunan
Rp32,069,990,778

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPMSPH per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp32,069,990,778 dan Rp31,418,909,220. Mutasi transaksi

penambahan gedung dan bangunan di tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 651,082,558. Rincian penambahan nilai gedung dan bangunan tercantum dalam tabel di bawah ini

Tabel Mutasi Penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2016

URAIAN	NILAI (Rp.)
133111 Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	134,550,000
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	241,929,358
Pagar Permanen	274,603,200
Mutasi Tambah	651,082,558

*Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp1,466,279,600*

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPMSPH per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 1,466,279,600 dan Rp53,645,000. Rincian penambahan nilai aset jaringan dan irigasi disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel Mutasi Penambahan Jaringan Tahun 2016

URAIAN	NILAI (Rp.)
134113 Jaringan	
Instalasi Gas	199,870,000
Jaringan Transmisi Tegangan 100 s.d. 300 KVA	1,210,611,600
Mutasi Tambah	1,410,481,600

Tabel Mutasi Penambahan Jaringan Tahun 2016

URAIAN	NILAI (Rp.)
134112 Irigasi	2,153,000
Mutasi Tambah	2,153,000

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan di tahun 2015 sebesar Rp. 53,645,000 sehingga aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2016 sebesar Rp. 1,466,279,600.

*Aset Tetap Lainnya
Rp27,000,000*

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPMSPH per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp27,000,000 dan Rp27,000,000. Tidak ada mutasi tambah pada aset tetap lainnya. Berikut daftar aset tetap yang dimiliki BPMSPH.

Aset tetap lainnya BPMSPH Tahun 2016

URAIAN	NILAI (Rp.)
135121 Aset Tetap Lainnya	
Monografi (4)	2,500,000
Alat Musik Modern/ Band (1)	24,500,000
Mutasi Tambah	27,000,000

Aset Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

Rp49,076,500

C.2.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki BPMSPH per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp49,076,500 dan Rp49,076,500. yang merupakan nilai nominal untuk jasa konsultan perencanaan pembangunan asrama Bimtek (PT. Reka Graha Indah Abadi) pada tahun 2015.

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

Rp 19,449,354,780

C.2.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPMSPH per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 19,449,354,780 dan Rp 15,642,594,193.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	32,680,231,018	-18,232,963,043	14,447,267,975
2.	Gedung dan Bangunan	32,069,880,778	-1,160,223,667	30,909,657,111
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,466,279,600	-31,668,070	1,434,611,530
4.	Aset Tetap Lainnya	27,000,000	-24,500,000	2,500,000

Akumulasi Penyusutan	66,243,391,396	-19,449,354,780	46,794,036,616
-----------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

Aset Lain-lain
Rp240,178,000

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPMSPH per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp240.178.000,00 dan Rp240.178.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPMSPH serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Aset Gedung dan Bangunan
Rp 239,878,000

C.3.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPMSPH per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 239,878,000 dan Rp 239,578,000.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	240,178,000	-239,878,000	300,000
Akumulasi Penyusutan		240,178,000	-239,878,000	300,000

Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp32,605,164

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp32,605,164 dan

Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga BPMSPH per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2016

Uraian	Nilai
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	
Langganan Air	1,665,000
Langganan Listrik	28,791,627
Langganan Telepon	214,837
Jumlah	32,605,164

Jumlah Ekuitas
Rp71,084,342,736

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 71,084,342,736 dan Rp 70,056,390,591. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan

PNBP

Rp250,483,785

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp250,483,785 dan Rp642,239,451.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	70,575,130	-100
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4,839,285,00	23,435,821	-79.35
Pendapatan Jasa Lainnya	2,200,000	0	0
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	243,444,500	548,228,500	-55.59
Jumlah	250,483,785	642,239,451	-61

Pendapatan Jasa berasal dari pengujian produk asal hewan selama tahun 2016. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2015.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai

Rp3,168,727,479

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3,168,727,479 dan Rp2,939,923,359. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	2,139,941,500	1,921,125,600	11.39
Beban Pembulatan Gaji PNS	28,429	49,241	-42.27
Beban Tunj. Anak PNS	44,757,748	44,450,908	0.69
Beban Tunj. Beras PNS	123,765,780	126,926,300	-2.49
Beban Tunj. Fungsional PNS	295,435,000	282,695,000	4.51
Beban Tunj. PPh PNS	30,344,276	47,689,104	-36.37
Beban Tunj. Struktural PNS	37,440,000	37,440,000	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	142,277,746	136,112,806	4.53
Beban Tunjangan Umum PNS	41,775,000	37,465,000	11.50
Beban Uang Lembur	11,928,000	23,786,400	-49.85
Beban Uang Makan PNS	301,034,000	282,183,000	6.68
Jumlah	3,168,727,479	2,939,923,359	7.78

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp 449,851,312*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 449,851,312 dan Rp2.569.189.878,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	440,879,232	2,538,473,430	-82.63
Beban Persediaan konsumsi	8,972,080	30,716,448	-70.79
Jumlah	449,851,312	2,569,189,878	-82.49

Beban Barang dan Jasa

Rp3,996,257,292

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3,996,257,292 dan Rp3,478,875,281. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	2,900,000	-100
Beban Bahan	756,449,146	841,344,990	-10.09
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,468,480,909	1,173,325,985	25.16
Beban Barang Operasional Lainnya	21,960,000	45,200,000	-51.42
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	199,400,000	151,600,000	31.53
Beban Honor Output Kegiatan	65,905,000	175,655,000	-62.48
Beban Jasa Profesi	77,753,470	130,975,000	-40.64
Beban Keperluan Perkantoran	695,503,865	545,745,200	27.44

Beban Langganan Air	22,383,000	17,142,100	30.57
Beban Langganan Listrik	479,242,356	224,537,738	113.44
Beban Langganan Telepon	17,413,971	11,533,368	50.99
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	187,445,405	155,337,400	20.67
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,320,170	3,578,500	20.73
Jumlah	3,996,257,292	3,478,875,281	14.87

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp 2,143,837,985 Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 2,143,837,985 dan Rp1,615,587,288. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	339,665,660	144,768,258	134.63
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	267,382,896	218,348,574	22.46
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,149,870,263	416,682,350	175.96
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	38,556,384	53,471,844	-27.89
Beban Persediaan suku cadang	348,362,782	782,316,262	-55.47
Jumlah	2,143,837,985	1,615,587,288	32.69

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp1,759,351,263

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1,759,351,263 dan Rp2,451,973,205. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	1.559,022,593	2,177,523,530	-28.40
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	21,497,050	0	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,940,000	22,235,000	-50.80
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,440,000	16,788,900	-37.82
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	157,451,620	235,425,775	-33.12
Jumlah	1,759,351,263	2,451,973,205	-28.25

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp
3,816,337,447

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3,816,337,447 dan Rp2,539,797,459. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	639,916,469	337,844,476	89.41
Beban Penyusutan Irigasi	108,213	107,650	0.52
Beban Penyusutan Jaringan	20,428,215	1,958,764	942.91
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	300.000	300.000	0
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,155,584,580	2,199,586,569	43.46
Jumlah	3,816,337,447	2,539,797,459	50.26

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-2,666,230. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2016 dan 2015*

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Penyisihan Piutang PNB	0	-2,666,230	-100
Jumlah	0	-2,666,230	-100

D.9 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan
Non Operasional
(Rp.
366,489,109)

Pos Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.345.000,00	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	626,047,638	0
Jumlah Defisit Aset Non Lancar	-622,702,638	0
Pendapatan dari kegiatan non operasional	355,859,226	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	13,040,780
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	99,645,697	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	21,210
Jumlah surplus dari kegiatan non operasional lainnya	256,213,529	13,061,990
Jumlah Surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	-366,489,109	13,061,990

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp70,056,390,591 Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp70,056,390,591 dan Rp. 42,468,051,199.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp15,450,368,132 Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 15,450,368,132 dan Rp 14,937,378,799. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

E.4.1 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp 635,324,526 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 635,324,526 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.2 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian
Nilai Aset
sebesar Rp. 0 Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp511,804,985. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp15,842,995,749 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp15,842,995,749 dan Rp42,013,913,206. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

.Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2016.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	16,206,718,149
Diterima dari Entitas Lain	-363,722,400
Jumlah	15,842,995,749

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp71,084,342,736 Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 71,084,342,736 dan Rp 70,056,390,591.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 7 Maret 2017 pada *Exit Meeting* BPK RI wilayah Jawa Barat di BALITRO Bogor, tentang Kesalahan Penganggaran dan Pencatatan Aset Tetap Dalam Akun Persediaan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan minimal senilai Rp. 688,652,403 terdapat pada bagian lampiran pada laporan tahunan ini. Hasil pemeriksaan sudah ditindaklanjuti dan telah dilakukan perbaikan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts./KU.010/01/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5174/Kpts./KU.140/12/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Direktorat Jenderal peternakan dan Kesehatan hewan Kementerian Pertanian sebagai berikut

Semula :

Bendahara Pengeluaran : Dadang Gani

Bendahara Penerimaan : Elah Sriheryanti, A.Md

Menjadi :

Bendaharan Pengeluaran : Kudung Suroso

Bendahara Penerimaan : Dadang Gani